



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : IKE SITORESMI MULYO P
- Jabatan : SEKRETARIS BADAN
- NHK : 861762

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.880.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/62 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
- Tanah Seluas 3068 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 2.320.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 521.900.000

- MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
- MOBIL, ISUZU TRUCK BAK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
- MOTOR, HONDA KHARISMA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.876.386

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.407.776.386

**III. HUTANG** Rp. 270.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.137.776.386

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.